

Dana Bansos Disalurkan di Kabupaten Banjar, Begini Keinginan Penerima Manfaat



Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai BBM di Aula Kantor Kecamatan Martapura, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (3/11/2022).

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penyaluran-dana-BLT-BBM-di-Aula-Kantor-Kecamatan-Martapura-kalsel-Kamis-03112022.jpg>

Aula Kantor Kecamatan Martapura di Jalan Sekumpul Ujung, Desa Bincau, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dipenuhi warga, Kamis (3/11/2022).

Mereka memenuhi undangan sebagai penerima manfaat Bantuan Tunai Langsung (BLT) terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Masing-masing menerima sebesar Rp 600 ribu.

Penuturan Siti Nafiah dan Aslamiah, warga Kelurahan Murung Keraton Kota Martapura yang antre untuk mendapat giliran menerima bantuan, mengaku akan memanfaatkannya untuk keperluan sekolah anak.

Sedangkan Muhammad Irfani, juga penerima, mengatakan akan memanfaatkannya untuk modal usaha dan keperluan rumah tangga.

Warga Desa Murung Kenanga ini mewakili istrinya untuk mengambil dana dengan memperlihatkan Kartu Keluarga dan KTP.

"Bersyukur, dalam keadaan seperti ini bahan makanan serba naik, tertolong dengan adanya bantuan," ungkapnya.

Sementara itu, menurut Soraya, staf Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, mengatakan, penyaluran bantuan berlangsung hingga Sabtu (5/11) .

Menurutnya, selama kegiatan penyaluran BLT BBM tidak ada hambatan. Warga antre dengan tertib, menunggu namanya dipanggil untuk menerima bantuan sosial.

Terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Ranuwaty Rosayulinda, saat dihubungi Banjarmasinpost.co.id, membenarkan tentang penyaluran dana ini.

Menurutnya, bantuan itu sumbernya dari Pemkab Banjar yang mengalokasikan 2 persen dari Dana Alokasi Umum untuk bansos sesuai arahan pemerintah pusat.

Setiap bulan Rp 150 ribu dibayarkan sekaligus selama empat bulan, sehingga total Rp 600 ribu.

Semua itu, total untuk 10.403 penerima manfaat se - Kabupaten Banjar. Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Awal Oktober ini, Pemerintah Kabupaten Banjar akan menyalurkan bantuan sosial akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diterapkan pemerintah pada 3 September 2022.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Ranuwaty Rosayulinda, membenarkannya, saat dikonfirmasi, Senin (26/9/2022).

Menurutnya, bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan itu merupakan alokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar.

"Ada delapan kategori penerima bansos yang jumlahnya sebanyak 10.403 Keluarga Penerima Manfaat atau KPM se Kabupaten Banjar," katanya.

Delapan kategori itu adalah orangtua balita stunting usia 0 hingga 59 bulan, lanjut usia, disabilitas, sopir angkutan, ojol, pelaku usaha mikro, nelayan perikanan tangkap dan kelotok.

Sebelum penyaluran, Ranuwaty Rosayulinda mengatakan, bersama tim melakukan inventarisasi dan validasi agar penerima tidak ganda.

"Syarat penerima bansos BBM cukup memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga. Nanti penyaluran bansos di wilayah kecamatan," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, M Thoha, mengaku, pelaku usaha budi daya ikan di Desa Sungai Landas dianggap mampu karena memiliki modal untuk membeli pakan.

"Kami mendata warga yang lanjut usia dan miskin. Itupun tidak dobel bantuannya. Kalau dobel, kami minta memilih salah satu dari bantuan sosial tersebut," katanya.

Kepala Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, juga melakukan verifikasi terhadap warganya yang kurang mampu secara ekonomi.

Menurutnya, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah melalui pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa sehingga harus selektif dan tidak berbuntut masalah hukum karena dobel Bansos.

"Pemerintah desa kami menyalurkan BLT Alokasi Dana Desa. Sedang BLT BBM bagi warga yang mendapat bantuan dari Kementerian Sosial melalui Kantor Pos Martapura," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/11/03/dana-bansos-disalurkan-di-kabupaten-banjar-begini-keinginan-penerima-manfaat>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/26/awal-oktober-2022-pemerintah-kabupaten-banjar-salurkan-bansos-kepada-10403-kpm>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.